

*Kerangka Acuan Kerja*  
**Pembuatan of Policy Brief tentang Potensi dari Sektor  
Kehutanan untuk Pasar Karbon Domestik dan  
Internasional**

**Kontrak Penyediaan Jasa:**

Melakukan analisis kebijakan dan teknis serta menyusun ringkasan kebijakan mengenai potensi kontribusi sektor kehutanan khususnya PBPH dalam menurunkan emisi sesuai target Pemerintah Indonesia dalam FOLU Net Sink, dan pasar karbon di Indonesia, baik domestik maupun internasional.

YKAN berasumsi bahwa setiap sektor dapat mengurangi emisi dengan menggunakan metodologi tertentu. YKAN bermaksud menganalisis potensi kontribusi sektor swasta, khususnya konsesi penebangan hutan untuk mengurangi emisi dan menghitung kontribusinya terhadap NDC Pemerintah Indonesia.

Analisisnya harus mencakup hal-hal berikut:

1. Potensi penurunan emisi dari proyek karbon hutan yang cocok untuk konsesi penebangan, seperti penerapan RIL-C, perlindungan kawasan penebangan, dan intensifikasi silvikultur. Estimasinya harus mengikuti metodologi yang kuat.
2. Potensi pengurangan emisi harus dikaitkan dengan FOLU Net Sink dan target NDC Indonesia.
3. Berapa besar hasil pengurangan emisi yang akan digunakan untuk pasar domestik, dan berapa banyak yang memenuhi syarat untuk pasar internasional.
4. Daftar entitas yang berpotensi menjadi pembeli dari pasar domestik dan internasional dengan melakukan wawancara primer dengan entitas potensial.

Kontraktor diharapkan melakukan konsultasi publik atau diskusi kelompok terfokus dengan pemangku kepentingan utama (yaitu KLHK, Kemenkeu, APHI, dan sektor swasta, Kementerian Perdagangan, OJK, BEI karbon).

**Latar Belakang:**

*Yayasan Konservasi Alam Nusantara*

Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) merupakan organisasi nirlaba berbasis ilmiah yang telah hadir di Indonesia sejak tahun 2014. Memiliki misi untuk melindungi daratan dan perairan yang menjadi sandaran seluruh kehidupan, YKAN memberikan solusi inovatif untuk menciptakan keharmonisan antara manusia dan alam melalui pengelolaan sumber daya alam yang efektif, mengedepankan pendekatan non-konfrontatif, dan membangun jaringan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan demi Indonesia berkelanjutan.

*Sustainable Forest Management*

Lebih dari 50% kawasan hutan di Kalimantan dialokasikan untuk tujuan produksi. Praktek pengelolaan di wilayah ini akan mempunyai dampak yang signifikan terhadap iklim dan keanekaragaman hayati. Sayangnya, terdapat banyak tantangan struktural dalam menerapkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan, hal ini berakibat pada pengelolaan

hutan yang belum berkelanjutan oleh pemilik PBPH, atau konsesi-konsesi yang tidak aktif karena rendahnya profitabilitas bisnis kayu – yang mana keduanya menjadi factor yang dapat meningkatkan risiko deforestasi. Strategi pengelolaan hutan Lestari yang dikembangkan oleh YKAN dimaksudkan untuk memperbaiki pengelolaan konsesi hutan melalui penerapan RIL-C, potensi dari menjaga kawasan hutan, pengayaan penanaman, peningkatan teknologi, dan peningkatan peralatan. Analisis dari konsultan diharapkan untuk membantu YKAN untuk memastikan dan menyiapkan berbagai pilihan strategis yang dapat digunakan untuk memperluas strategi SFM ini di seluruh Indonesia.

Selain RIL-C, Pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan peraturan izin multi-usaha, yang memungkinkan konsesi untuk mengelola wilayah mereka melalui kombinasi model bisnis (dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya ketika Pemerintah Indonesia tidak mengizinkan kegiatan selain dari penebangan hutan pada konsesi HPH pada hutan produksi. TNC/YKAN percaya bahwa peraturan ini dapat menjadi pendorong penerapan pengelolaan hutan lestari pada tataran atau lingkup konsesi.

**Persyaratan Pengalaman:**

- Pengetahuan dan keahlian di bidang kehutanan produksi khususnya di Indonesia, termasuk praktik pengelolaan hutan lestari.
- Pengetahuan atau keahlian teknis dalam isu perubahan iklim di dalam dan luar negeri.
- Memiliki pemahaman yang baik tentang rencana bisnis/investasi terkait dengan konsesi penebangan kayu di Indonesia.
- • Pemahaman yang baik dalam aspek hukum di sektor kehutanan, misalnya cara mendapatkan izin konsesi, persyaratan hukum untuk jasa jasa pengelolaan kayu, implementasi peraturan izin multi usaha dari KLHK, kebijakan perubahan iklim, dll.
- Memiliki kemampuan fasilitasi dan bahasa untuk mendapatkan masukan/umpan balik yang optimal dari pemangku kepentingan terkait.
- Kemampuan untuk menulis dan menyaring informasi yang kompleks untuk menghasilkan laporan analisis yang mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan utama.

Policy brief yang akan dibuat oleh Kontraktor harus mengikuti garis besar yang akan dibahas dan disepakati dengan YKAN. Laporan harus ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris

**Lokasi:**

Konsultan dapat dimungkinkan untuk melakukan perjalanan apabila diperlukan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dari lokasi atau daerah tertentu untuk mendukung penulisan Policy Brief ini.

**Pekerjaan & Jadwal Pembayaran:**

<b>Pekerjaan</b>	<b>Tenggat Waktu</b>	<b>Pembayaran</b>
Outline dari Policy Brief yang disetujui oleh YKAN	15 Juni 2024	20%
Draft pertama dari Policy Brief	15 August 2024	30%
Melakukan Focused group discussion (yang dihadiri oleh KLHK, Kemenkeu, APHI, Sektor Swasta) dalam penyempurnaan naskah Policy Brief	15 September 2024	30%
Final policy brief diserahkan kepada Kementerian/Lembaga Kunci yang diperlukan	15 Oktober 2024	20%

**Petunjuk Aplikasi:**

Kandidat yang berminat harus mengirimkan proposal teknis (maks. 10 halaman), proposal keuangan, dan contoh pekerjaan relevan sebelumnya ke sandoro.purba@ykan.or.id. Batas waktu penyerahannya adalah 8 Mei 2024.